

“Kalau kerja keras katanya pasti dibalas, kenapa yang paling keras kerja justru sering paling sedikit dibayar?”

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

"Empat Lensa Membaca Keadilan Upah"

Pekan ini timeline dipenuhi keluhan yang sebenarnya klasik: pekerja merasa simpanan hari tuanya dipotong setelah bertahun-tahun bekerja, gelombang pemutusan hubungan kerja mengancam ribuan orang dengan dalih efisiensi, pegawai koperasi desa bekerja sebulan penuh tanpa tahu berapa gajinya, dan seorang bekas karyawan rumah sakit rela upahnya dicicil setelah empat bulan tanpa bayaran. Di sisi lain, petani di pedalaman menanti sumur

bor sementara nelayan tak bisa melaut karena cuaca. Ada satu pertanyaan yang menghubungkan semua ini: mengapa kontribusi kerja dan imbalan yang diterima begitu sering tidak sebanding? Sebelum melompat ke jargon moral, ada baiknya persoalan ini dibedah dari beberapa sudut.

Lensa pertama, dari ekonomi klasik: upah ditentukan oleh penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketika tenaga kerja berlimpah dan lapangan kerja menyempit, posisi tawar pekerja melemah, sehingga upah tertekan dan "efisiensi" menjadi kata yang mudah diucapkan pengusaha. Implikasinya, ketidakadilan upah dianggap sekadar mekanisme pasar yang netral. Tetapi celah lensa ini jelas: pasar tidak pernah benar-benar netral karena posisi tawar diwariskan oleh struktur yang timpang sejak awal. Pertanyaan yang muncul: bila pasar hanya mengukur harga, siapa yang mengukur keadilan?

Lensa kedua, dari sosiologi: relasi kerja adalah relasi kuasa, bukan sekadar transaksi. Pihak yang menguasai modal menentukan aturan main, dan pekerja yang lemah menandatangani kontrak yang tidak pernah benar-benar ia negosiasikan. Implikasinya, penyelesaian sejati menuntut penyeimbangan kuasa — serikat, regulasi, advokasi. Namun celahnya, penyeimbangan kuasa mudah berubah menjadi pertarungan kepentingan baru yang sama-sama tidak peduli pada yang paling lemah. Pertanyaannya: apakah keadilan bisa lahir hanya dari pergeseran kuasa, atau ia butuh sesuatu yang menahan kuasa itu sendiri?

Lensa ketiga, dari teologi Islam: keadilan upah bertumpu pada prinsip *amanah* dan *adl*. QS. An-Nisaa: 58 mengingatkan tentang menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan dengan adil — upah pekerja adalah amanat, bukan belas kasihan pemberi kerja. Prinsip *mizan*, timbangan, menegaskan bahwa setiap kontribusi punya bobotnya yang tidak boleh dikurangi. Implikasinya, keadilan bukan hasil tawar-menawar kuasa, melainkan kewajiban yang mengikat hati nurani

bahkan ketika tidak ada pengawas. Celah lensa ini di ranah praktik: prinsip yang luhur sering berhenti sebagai khotbah bila tidak diterjemahkan ke mekanisme yang mengikat. Pertanyaannya: bagaimana nurani individual bisa menjadi struktur yang menegakkan keadilan secara kolektif?

Lensa keempat, dari psikologi moral: manusia cenderung merasionalisasi ketidakadilan yang menguntungkan dirinya. Pemberi kerja yang menahan upah jarang merasa zalim; ia menyebutnya "efisiensi" atau "kondisi sulit". Implikasinya, akar ketidakadilan bukan hanya sistem, tapi juga self-deception yang membuat pelaku merasa benar. Celahnya, fokus pada moral individual bisa mengabaikan bahwa sebagian ketidakadilan memang bersifat struktural dan tidak selesai dengan perbaikan niat. Pertanyaan penutup keempat lensa ini: mungkinkah keadilan upah ditegakkan tanpa memperbaiki sistem dan hati sekaligus?

Lalu apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa hari ini, sebelum ia punya kuasa mengubah kebijakan? Di ruang magang, seorang mahasiswa bisa mulai dengan menuntut kejelasan akad: berapa dibayar, kapan, untuk apa — kejelasan itu sendiri adalah bibit keadilan. Di organisasi kampus yang mengelola dana, ia bisa membiasakan transparansi kas sekecil apa pun. Di kos dan kantin, ia bisa berhenti menawar habis-habisan pada pedagang kecil yang untungnya sudah tipis. Di kelas, ia bisa mengangkat kasus upah dan hak pekerja sebagai bahan kajian yang serius, bukan sekadar status media sosial. Dan ketika kelak memegang posisi, ia bisa mengingat bahwa "efisiensi" tidak boleh menjadi selubung yang menutupi hak orang lemah. Langkah-langkah ini kecil, tapi ia melatih nurani yang akan menentukan bagaimana ia memakai kuasa nanti.

Yang penting bukan menemukan lensa mana yang paling benar, melainkan menyadari bahwa keadilan upah menuntut pasar yang jujur, kuasa yang seimbang, nurani yang terikat amanah, dan sistem yang mengikat sekaligus. Lensa apa pun yang dipilih sebagai prioritas,

selalu ada lensa lain yang menutupi celahnya. Mungkin di situlah letak kedewasaan berpikir: menahan diri dari jawaban tunggal yang terlalu cepat.

| Pertanyaan

Q · 01

Bukannya ini murni masalah sistem ekonomi, bukan urusan agama? Kenapa harus dibawa-bawa ke teologi?

A

Sebagian benar — struktur ekonomi memang menentukan banyak hal. Tapi sistem dijalankan oleh manusia yang punya nurani, dan nurani itulah yang menentukan apakah aturan ditegakkan atau diakali. Teologi tidak menggantikan analisis sistem; ia menambahkan lapisan yang menahan pelaku ketika pengawasan tidak ada.

Q · 02

Kenapa Islam yang harus repot ngurusin ekonomi modern yang lahir jauh setelahnya?

A

Prinsip yang dibawa Islam bukan tentang bentuk ekonomi tertentu, melainkan tentang keadilan dan amanah yang berlaku lintas zaman. Bentuk kontrak kerja berubah, tapi pertanyaan "apakah hak orang ditunaikan" tetap sama. Jadi bukan Islam yang memaksa masuk, melainkan persoalannya yang memang selalu bersinggungan dengan keadilan.

Q · 03

Apa bedanya artikel ini dengan moralisme generik "jadilah orang jujur"?

A

Moralisme generik berhenti pada imbauan. Di sini justru ditunjukkan bahwa nurani saja tidak cukup tanpa sistem, dan sistem tidak cukup tanpa nurani. Yang ditawarkan bukan slogan, melainkan kesadaran bahwa keempat lensa harus bekerja bersamaan — itu jauh dari sekadar "jadilah baik".

Q · 04

Bukankah mengaitkan agama dengan tuntutan buruh justru bisa dipolitisasi dan berbahaya?

A

Risiko politisasi memang nyata, dan itu perlu diwaspadai. Tapi menghindari agama sama sekali dari isu keadilan juga meninggalkan kekosongan yang diisi kepentingan lain. Kuncinya bukan menjauhkan nilai dari isu publik, melainkan menjaga agar nilai itu tetap melayani yang lemah, bukan ditunggangi yang kuat.

Saya sendiri tidak terlalu religius. Apakah prinsip keadilan upah ini masih relevan buat saya?

A

Sangat relevan. Keadilan dan amanah bukan monopoli orang religius; keduanya bisa dipahami sebagai kewajiban rasional terhadap sesama. Kerangka agama di sini berfungsi sebagai salah satu lensa yang memperkaya, bukan syarat masuk. Prinsip menahan diri dari mengurangi hak orang lain berlaku universal.